

## IMPLEMENTASI KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENGENDALIAN LEPTOSPIROSIS DI KABUPATEN JENEPONTO

### *Implementation of Cross Sectoral Coordination in the Controlling of Leptospirosis in Jeneponto Regency*

Wirdayanti<sup>1</sup>, Syamsuar Manyullei<sup>2\*</sup>, Muh. Fajaruddin Natsir<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departemen Kesehatan Lingkungan, FKM Universitas Hasanuddin, wirdayanti309@gmail.com

<sup>2</sup>Departemen Kesehatan Lingkungan, FKM Universitas Hasanuddin, syamsuar.m@unhas.ac.id

<sup>3</sup>Departemen Kesehatan Lingkungan, FKM Universitas Hasanuddin, ahmadfajarislam@gmail.com

\*Alamat Korespondensi: Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan

#### ARTICLE INFO

##### *Article History:*

Received March, 11<sup>th</sup>, 2020

Revised form March, 15<sup>th</sup>, 2020

Accepted June, 17<sup>th</sup>, 2020

Published June, 2020

#### **Kata Kunci:**

Leptospirosis;  
pengendalian;  
lintas sektor;  
koordinasi;

#### **Keywords:**

*leptospirosis;*  
*control;*  
*cross-sectoral;*  
*coordination;*

#### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Leptospirosis adalah salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *leptospira* sp. dan banyak ditemukan pada populasi masyarakat yang bermukim di pedesaan. Leptospirosis juga merupakan penyakit *zoonosis* yang dapat mewabah dan membawa dampak yang merugikan secara ekonomi maupun sosial dan psikis. Penyakit *zoonosis* erat kaitannya dengan kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan sehingga dalam pengendalian dan pencegahannya perlu keterlibatan atau kerjasama berbagai pihak mutlak. **Tujuan:** Mengetahui kerjasama lintas sektor melalui koordinasi dalam rangka pengendalian leptospirosis di Kabupaten Jeneponto. **Metode:** Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 14 orang. Penentuan informan diperoleh secara *purposive sampling* dengan menentukan kriteria informan yaitu bersedia untuk diwawancarai dan berperan penting dalam pengendalian penyakit menular. **Hasil:** Menunjukkan bahwa koordinasi antara informan dalam lintas sektor sudah dilaksanakan melalui lokmin di puskesmas yang dilaksanakan setiap triwulan. Koordinasi yang dijalankan informan dalam suatu pengendalian leptospirosis masih perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada saat terjadi kasus atau wabah di lingkungan masyarakat. **Kesimpulan:** Koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan terutama dalam pengendalian penyakit *zoonosis* yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun saran peneliti kepada petugas kesehatan puskesmas agar selalu melakukan koordinasi dengan baik terhadap sektor lain yang seharusnya dilibatkan dalam pengendalian leptospirosis.

#### ABSTRACT

**Background:** *Leptospirosis is an infectious disease caused by leptospira sp. and many are found in populations of people who live in rural areas. Leptospirosis is also a zoonotic disease that can be endemic and has adverse*

*economic, social and psychological consequences. Zoonotic disease is closely related to human health, animals, and also the environment so that in controlling and preventing it is necessary the involvement or cooperation of various parties absolutely. Purpose: This study was to determine cross-sectoral cooperation through coordination in the context of controlling leptospirosis in Jeneponto Regency. Methods: This type of research is qualitative with a phenomenological design. The number of informants in this study was 14 people. Determination of informants obtained by purposive sampling by determining the criteria for informants who are willing to be interviewed and play an important role in controlling infectious diseases. Results: Showed that coordination between informants in the cross-sector had been carried out through the administration at the puskesmas conducted every quarter. Coordination conducted by the informant in controlling leptospirosis still needs to be improved, especially communication in the event of a case or outbreak in the community. Conclusion: The conclusion in this study is that cross-sectoral coordination needs to be improved, especially in controlling zoonotic diseases that occur in the community. The researchers suggest to the health center health workers to always coordinate well with other sectors that should be involved in controlling leptospirosis.*

©2020 by author.

Published by Faculty of Public Health, Hasanuddin University.

This is an open access article under CC-BY-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Leptospirosis adalah penyakit *zoonosis* yang berpotensi fatal menyebabkan endemik di berbagai daerah yang beriklim tropis dan menyebabkan epidemi setelah hujan deras dan banjir. Infeksi ini terjadi akibat paparan langsung atau tidak langsung pada hewan yang terinfeksi membawa patogen dalam tubulus ginjalnya dan melepaskan patogen *leptospira* melalui urin.<sup>1</sup> Leptospirosis merupakan kejadian yang bersifat *incidental* karena inang yang paling banyak adalah tikus.<sup>14</sup> Meskipun banyak hewan lain yang dapat dijadikan sebagai inang reservoir, akan tetapi *Rattus norvegicus* adalah sumber infeksi manusia yang paling sering terinfeksi oleh bakteri *leptospira*.<sup>1</sup>

Penyakit leptospirosis ini juga biasa disebut *Weil disease*.<sup>2</sup> Penyakit ini disebarkan melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri *leptospira* ataupun menyerang manusia melalui kontak langsung dengan air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri *leptospira*.<sup>3</sup> Faktor risiko dalam penularan penyakit yang ditularkan tikus ke manusia adalah faktor kondisi lingkungan sebagai habitat tikus.<sup>4</sup> Laporan *Internasional Leptospirosis Society* (ILS) menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara tropis dengan kasus kematian leptospirosis relatif tinggi, yaitu berkisar antara 2,5% - 16,45% atau rata-rata 7,1% dan termasuk peringkat tertinggi ketiga di dunia untuk mortalitas.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada kasus kematian akibat leptospirosis pada tahun

2015 - 2018 terus mengalami peningkatan. Angka kematian tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu sebanyak 148 kematian.<sup>5,6</sup>

Data kasus leptospirosis di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2016-2018 tidak ditemukan.<sup>6</sup> Namun, jika melihat faktor risiko penularan leptospirosis yaitu tingginya populasi tikus yang berpotensi untuk menginfeksi manusia melalui bakteri *leptospira* maka perlu dilakukan suatu intervensi untuk mencegah timbulnya kasus leptospirosis di wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya menyatakan bahwa ketika jumlah tikus yang berada di lingkungan melebihi nilai baku mutu maka perlu dilakukan suatu pengendalian. Adapun nilai baku mutu untuk tikus adalah  $<1$ .<sup>7</sup>

Provinsi Sulawesi Selatan telah didapatkan dua ekor tikus yang positif adanya bakteri *leptospira* dari tujuh sampel tikus yang telah diperiksa. Hasil tersebut diperoleh dari penelitian tentang identifikasi keberadaan serovar bakteri *leptospira* pada serum darah tikus di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.<sup>8</sup> Sedangkan daerah di Sulawesi Selatan yang berisiko tinggi terkontaminasi bakteri *leptospira* disebabkan karena kondisi aspek lingkungan. Kondisi aspek lingkungan yang dimaksud adalah penggunaan sumber air permukaan dan kualitas fisik air sungai yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan informasi dari petugas surveilans Puskesmas Buludoang di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 menyatakan bahwa dari puluhan jumlah tikus yang telah diperiksa, diperoleh dua ekor tikus yang positif adanya bakteri *leptospira*. Salah satu penyebab ditemukannya bakteri tersebut adalah kondisi sanitasi lingkungan yang masih tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian persentase rumah sehat pada tahun 2016 hanya sebesar 48,57%, dan persentase tersebut dikategorikan sebagai persentase yang terendah.<sup>10</sup> Untuk itu perlu adanya suatu intervensi dalam mengatasi masalah tersebut berupa intervensi risiko kesehatan. Intervensi berbasis risiko kesehatan dapat dilakukan melalui integrasi dan sinergi kegiatan lintas program maupun lintas sektor. Kerjasama antar lintas sektoral atau pemangku kepentingan lainnya yang berguna untuk mengatasi jenis-jenis masalah penyakit yang melibatkan interaksi kompleks antara manusia, hewan, dan lingkungan.<sup>11</sup> Kerjasama antar lintas sektoral atau pemangku kepentingan lainnya dianjurkan agar berguna untuk mengatasi jenis-jenis masalah penyakit yang melibatkan interaksi kompleks antara manusia, hewan, dan lingkungan.<sup>15</sup>

Intervensi berbasis risiko kesehatan dapat dilakukan melalui integrasi dan sinergi kegiatan lintas program maupun lintas sektor.<sup>16</sup> Bentuk intervensi risiko kesehatan yang dimaksud untuk mengatasi masalah kesehatan salah satunya adalah kerjasama lintas sektor melalui penerapan konsep *one health*. *One health* adalah sebuah konsep yang melibatkan tiga unsur utama yaitu manusia, hewan, dan lingkungan. Sehingga dalam proses penerapan konsep ini perlu mencakup kerjasama antar

multidisiplin ilmu yang terkait kesehatan, sosial, ekonomi, ekologi manusia, kesehatan dan biologi hewan serta ilmu lingkungan.<sup>17</sup>

Penerapan konsep *one health* sangat membutuhkan suatu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam melakukan pengendalian terhadap suatu penyakit. Pentingnya komunikasi yang terkoordinasi dalam penyebaran informasi merupakan kunci dari keberhasilan penerapan *one health*. Dalam menyampaikan informasi termasuk standar dan tujuan dari kebijakan dibutuhkan adanya penyampaian informasi yang akurat kepada para pelaksana dan harus konsisten dari berbagai sumber informasi. Komunikasi didalam dan diantara organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit.<sup>18</sup>

Kerjasama lintas sektor dalam mengatasi masalah penyakit leptospirosis sangat penting dilakukan melihat kasus leptospirosis yang masih menjadi masalah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kondisi sanitasi lingkungan yang masih tidak memenuhi persyaratan kesehatan merupakan salah satu faktor risiko keberadaan tikus. Adapun tujuan penelitian peneliti adalah mengetahui bagaimana implementasi kerjasama lintas sektor dalam rangka pengendalian leptospirosis di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan untuk lebih berkolaborasi dalam melakukan pengendalian terhadap leptospirosis. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai implementasi koordinasi lintas sektor dalam rangka pengendalian leptospirosis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk melakukan kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian leptospirosis khususnya di Kabupaten Jeneponto.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 - 31 Januari 2020 di Puskesmas Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang terdiri dari pemangku kepentingan dari sektor kesehatan dan sektor lain yang berperan penting dalam pengendalian leptospirosis. Penentuan informan diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*, dimana informan diperoleh dengan menentukan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penggalan data dari berbagai teknik dan sumber untuk memperjelas informasi di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) serta *Focus Group Discussion* (FGD). Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan secara manual sesuai dengan petunjuk pengolahan data kualitatif, serta sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selanjutnya, data dianalisis dengan metode *thematic analysis*, serta diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi.

## HASIL

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap beberapa informan mengenai koordinasi dalam kerjasama lintas sektor yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto diperoleh bahwa koordinasi dalam pengendalian penyakit menular (*leptospirosis*) sangat diperlukan. Koordinasi dengan lintas sektor sangat diperlukan ketika ada kejadian baru yang terjadi di lingkungan masyarakat. Keterlibatan lintas sektor dalam melakukan pengendalian *leptospirosis* dipantau oleh Dinas Kesehatan dan petugas kesehatan lainnya serta dari beberapa sektor lain yang terlibat seperti dari kecamatan.

*“Perlu sekali koordinasi. Jadi setiap ada kejadian baru yang terjadi, kita dan para jajaran lainnya melakukan koordinasi. Semua stakeholder dari kecamatan sampai kabupaten turun tangan untuk membantu. Termasuk pak sekda untuk memantau kejadian yang terjadi”*  
(Informan 8)

Selain itu, informan lain juga menjelaskan bahwa koordinasi memang diperlukan oleh manusia ataupun sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara bersama-sama maka perlu dilakukan koordinasi dengan orang luar. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh bahwa koordinasi dengan sektor luar kesehatan berperan sangat besar dalam keberhasilan pengendalian dan pencegahan yang dilakukan terutama dalam pengendalian *leptospirosis*. Berikut petikan pernyataan informan mengenai pentingnya koordinasi dalam lintas sektor:

*“iyya..... pastimi. Dimana-mana itu kalau ada manusia dan organisasi pasti butuh yang namanya koordinasi. Karena untuk mencapai titik maksimal dari apa tujuannya kita tentunya perlu campur tangan dari luar. Kalau dari orang kesehatan hanya 30% bisa berhasil kalau hanya bekerjasama pada sektor kesehatan saja. 70% nya ada di luar dari sektor kesehatan ”*  
(Informan 5)

Pendapat informan petugas kesehatan mengenai pentingnya melakukan koordinasi kerjasama lintas sektor dibuktikan juga dengan tanggapan informan lain dari lintas sektor. Informan sektor lain mengatakan dengan melakukan koordinasi maka masalah akan terselesaikan dengan bagus dan dapat menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Berikut petikan pernyataan informan dalam FGD:

*“Ya. Untuk menyelesaikan suatu problem, koordinasi sangat penting dan memang itu yang dibutuhkan. Karena tanpa berkoordinasi maka tidak akan terselesaikan dengan bagus”*  
(Informan 10)

Tanggapan informan lain mengenai pentingnya dilakukan koordinasi antar lintas sektor dijelaskan bahwa koordinasi yang mereka jalankan selama ini telah berjalan dengan baik. Koordinasi berjalan dengan baik terutama jika sedang terjadi kasus dalam lingkungan masyarakat. Berikut petikan pernyataan informan dalam wawancara mendalam:

*“Ya sangat penting. Untuk memperoleh kabar berita atau informasi yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Kami semua berkoordinasi dengan baik dan kami juga berkoordinasi dengan kepolisian disini”* (Informan 8)

Selain penjelasan informan mengenai pentingnya dilakukan koordinasi dalam kerjasama lintas sektor, informan juga menjelaskan bahwa tenaga surveilans merupakan orang yang bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan memberikan informasi pertama ketika terjadi kasus di lingkungan masyarakat. Tenaga surveilans melakukan pengumpulan dan survey di lingkungan masyarakat dan melaporkan ke Kepala Puskesmas untuk kemudian dilakukan intervensi. Berikut petikan jawaban informan dalam FGD:

*“Koordinasi lintas sektor sangat penting. Saya sendiri sebagai tenaga surveilans dan para jajaran lain yang berkaitan dengan pengendalian leptospirosis”* (Informan 1)

Selain itu, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi kerjasama lintas sektor di Kabupaten Jeneponto berjalan dengan baik. Salah satu informan mengatakan bahwa koordinasi yang dijalankan di Kabupaten Jeneponto sudah berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan informan berikut :

*“Ya. Karena kita turun dan kita sampaikan ke aparat desa. Kita sampaikan ke kantor camat dan sekcab turun bersama stafnya. Jadi semuanya berjalan dengan baik selama ini. Kita dari puskesmas juga sampaikan ke kader dan kader juga terlibat”*  
(Informan 6)

Informan lain juga menjelaskan bahwa dalam melakukan kerjasama, mereka selalu beriringan dengan puskesmas ataupun sektor lain yang terlibat dalam pengendalian leptospirosis atau kasus lain yang sedang terjadi di masyarakat. Peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu dikoordinasi dengan baik kepada sektor yang seharusnya terlibat dalam pengendalian leptospirosis. Hal tersebut dibuktikan dari petikan jawaban informan berikut pada saat FGD:

*“Ya, kita selalu beriringan dengan puskesmas. Jadi kita berkoordinasi terus jika terjadi kasus pada daerah tersebut”*  
(Informan 7)

Cara informan untuk melakukan koordinasi dengan lintas sektor berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa koordinasi dilakukan melalui *whatsapp* dan tim TGC. Tim TGC dibuat oleh dinas kesehatan dan informan terus berkoordinasi jika terjadi suatu wabah di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dari petikan jawaban informan berikut pada saat wawancara mendalam:

*“Kami sudah ada tim TGC. Kami berkoordinasi disitu. Kemudian kalau terjadi wabah maka kita biasanya melakukan koordinasi terus di whatsapp”*  
(Informan 12)

Informan lain juga menjelaskan bahwa cara melakukan koordinasi dengan sektor lain yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu secara detail mengenai kasus yang sedang terjadi di masyarakat.

Kemudian informan yang terlibat berkoordinasi untuk melakukan intervensi terkait dengan kasus yang sedang terjadi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari petikan jawaban informan berikut pada saat FGD:

*“Cara kami melakukan koordinasi yaitu kami sampaikan secara perlahan disana mengenai kasus yang sedang terjadi”* (Informan 8)

Tanggapan informan mengenai hambatan yang diperoleh ketika melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pengendalian leptospirosis di Kabupaten Jeneponto hampir dikatakan tidak ada hambatan. Informan melakukan koordinasi dengan baik dalam pengendalian penyakit yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan beberapa informan berikut saat dilakukan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap informan:

*“Tidak ada hambatan selama ini”*  
(Informan 2)

*“Tidak ada hambatan si selama melakukan koordinasi lintas sektor ini karena komunikasi kami juga lancar selama ini”*  
(Informan 7)

Berbeda halnya dengan tanggapan informan berikut yang mengatakan bahwa kerjasama lintas sektor kadang terhambat ketika tidak dikoordinasikan dengan baik ke sektor yang seharusnya terlibat. Informan dari sektor lain tidak dihubungi oleh sektor kesehatan ketika sedang terjadi kasus di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dari petikan jawaban informan berikut pada saat wawancara mendalam:

*“Satu hambatan yang kadang terjadi yaitu ketika dia (petugas kesehatan) tidak berkoordinasi dengan kami yang seharusnya ikut andil untuk mengamankan masyarakat”*  
(Informan 13)

Berbeda halnya dengan tanggapan informan lintas sektor pada saat wawancara mendalam. Informan tersebut menjelaskan bahwa koordinasi dengan sektor lain akan terhambat ketika komunikasi yang dijalan selama melakukan kerjasama tidak berjalan dengan baik. Berikut petikan jawaban informan dalam wawancara mendalam:

*“Kalau mau ki koordinasi ta jalan, salah satunya perbaiki ki komunikasi ta sesama petugas kesehatan maupun sektor lain yang terlibat dalam pengendalian”*  
(Informan 6)

Penelitian lebih lanjut menggali informasi dari informan mengenai cara mengatasi jika terjadi hambatan dalam melakukan koordinasi yaitu dengan langsung melakukan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing jika sudah mendapat informasi. Walaupun informasi tersebut diperoleh langsung dari masyarakat yang mengalami kejadian. Berikut petikan pernyataan informan yang diperoleh pada saat wawancara mendalam:

*“Terkadang kalau sesuatu sudah terjadi dan saya baru tahu, maka saya tetap hadir untuk membantu unntuk memberikan arahan ke masyarakat”*  
(Informan 13)

## PEMBAHASAN

Koordinasi yang baik harus dilandasi kerjasama (antara pemerintah pusat, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antar pemerintah daerah) dan saling memahami dengan mengedepankan semangat kesetaraan. Sehingga dalam menjalankan tugas-tugas untuk menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau penyakit *zoonosis* didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pada institusi masing-masing dan mendorong keterpaduan. Koordinasi akan berjalan berkesinambungan bila ada saling percaya antar institusi dan senantiasa menjaga kepercayaan yang telah tumbuh. Kepercayaan akan tumbuh apabila komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati. Dengan adanya komitmen, konsistensi, dan professional dalam menjalankan tugas-tugas maka integritas ‘kelompok’ koordinasi ini akan berjalan dengan baik.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto diperoleh bahwa koordinasi terhadap informan petugas kesehatan dan sektor lain telah dilaksanakan. Koordinasi lintas sektoral dan lintas program seperti kepala desa dan tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam penggerakan masyarakat dan anggotanya dalam pengendalian leptospirosis. Misalnya setiap kegiatan puskesmas harus seijin pemangku wilayah, karena pemangku wilayah bertindak sebagai pemilik wilayah untuk perijinan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan. Puskesmas bekerjasama dengan kader yang berfungsi sebagai penyalur informasi antara puskesmas dengan masyarakat secara umum.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini, informan mulai memahami mengenai pentingnya dilakukan koordinasi dalam melakukan pengendalian penyakit menular di lingkungan masyarakat. Keterlibatan lintas sektor dalam melakukan pengendalian leptospirosis dilakukan melalui pemantauan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten selaku pemegang tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait dengan upaya pelaksanaan pengendalian leptospirosis di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, informan juga menjelaskan bahwa koordinasi memang diperlukan oleh manusia atau organisasi untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kerjasama lintas sector, para pemangku kepentingan telah diberi tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan tupoksinya masing-masing. Beberapa informan menjelaskan bahwa dalam melakukan koordinasi dengan sector lain dalam menangani suatu kasus telah dibuatkan group whatsapp untuk memudahkan dalam melakukan komunikasi sehingga koordinasi yang dijalankan berjalan dengan baik. Sehingga dalam pengendalian leptospirosis ataupun penyakit lain yang sedang mewabah di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.



## KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi kerjasama lintas sektor dalam rangka pengendalian leptospirosis di Kabupaten Jeneponto, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kerjasama lintas sektor yang telah dijalankan selama ini masih perlu ditingkatkan. Mengingat hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, informan mengatakan bahwa koordinasi dalam kerjasama lintas sektor masih perlu dikoordinasikan dengan baik terhadap sektor yang seharusnya terlibat dalam pengendalian penyakit. Namun, informasi tersebut berbeda dengan jawaban informan dalam FGD yang mengatakan bahwa koordinasi yang telah dijalankan selama ini perlu dipertahakan, mengingat dalam penanganan kasus yang telah terjadi di Kabupaten Jeneponto telah dikoordinasikan baik oleh para sektor yang terlibat dalam pengendalian tersebut. Disarankan terhadap pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi dengan cara selalu melakukan lokmin lintas sektor setiap bulan untuk mengevaluasi hasil kerja yang telah dilaksanakan dan hal-hal yang perlu diperbaiki melalui koordinasi.

## REFERENSI

1. Adler, B. *Leptospira and Leptospirosis*. Springer; 2014.
2. Situmorang, P. R. Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Leptospirosis di Lingkungan II Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan IMELDA*. 2017;3(2):315-323.
3. Maiyulis, Syahrizal, M. and Munthe, P. G. Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Leptospirosis Menerapkan Metode Rule Base Reasoning'. *Informasi dan Teknologi Ilmiah (INTI)*. 2018;13(1):34-39.
4. Ikawati, B., Sulistiyan and Nurjazuli. Analisis Karakteristik Lingkungan pada Kejadian Leptospirosis di Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2009. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 2009;8(2);39-45.
5. Kemenkes RI. *Petunjuk Teknik Pengendalian Leptospirosis*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2017.
6. Kemenkes RI. *Profil Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2018.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya.

8. Andis, A.M. Identifikasi Keberadaan Serovar Bakteri *Leptospira* pada Serum Darah Tikus di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Menggunakan Metode Microscopic Agglutination Test (MAT). [Skripsi]. Makassar: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin; 2018.
9. Syamsuar, Daud, A, Maria, I.L, Hatta, M. Environmental Health Risk Assessment in Flood Prone Area; Case Study in Wajo District. *International Journal of Science and Healthcare Research*. 2018;3(4):9-16.
10. Dinkes Sulsel. Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016. Makassar: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; 2017.
11. Cleaveland, S, Sharp, J, Abela-Ridder, B, Allan, K.J, Buza, J, Crump, A, Davis, A, et al. One Health Contributions Towards More Effective and Equitable Approaches to Health in Low and Middle Income Countries. *The Royal Society Publishing: Philosophical Transactions of the Royal Society B*. 2017;372(1);1-11.
12. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pedoman Koordinasi Lintas Sektor (Menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE). Jakarta; 2018.
13. Wati, M. S., Mateus, S. A., & Lintang, D. S. Jenis Upaya, Sarana Prasarana, dan Keterlibatan Instansi dalam Pengendalian Faktor Risiko Leptospirosis di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2017;5(2):2356-3346.
14. Pasaribu, A. O., Mesran and Hasan, Y. Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Kaki Gajah Menggunakan Metode Certainty Factor. *Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*. 2018;17(4):375-381.
15. Cleaveland, S. et al. One Health Contributions towards More Effective and Equitable Approaches to Health in Low- and Middle-Income Countries. *The Royal Society*. 2017;372(1).
16. Kemenkes RI. Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2015.
17. Agungpriyono, S., Purnawarman, T, Suprayogi, A. Pengembangan Kompetensi Utama One Health (One Health Core Competency, OHCC) dalam Kurikulum Pendidikan Kedokteran Hewan, *Jurnal Palembang*. 2014;1(1):169-171.
18. Munggaran, G.A. Gambaran Implementasi Kebijakan Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) Melalui Program Gerakan 1 Rumah 1 Jumanatik di Puskesmas Kelurahan Benda Baru Kota Tangerang Selatan Tahun 2017. [Skripsi]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 2018.